

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
UNTUK KESEJAHTRAAN PETANI MISKIN
KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN
SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Deskriptif Kualitatif Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

UMBU ADEN BIDI NGARA
15520154

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

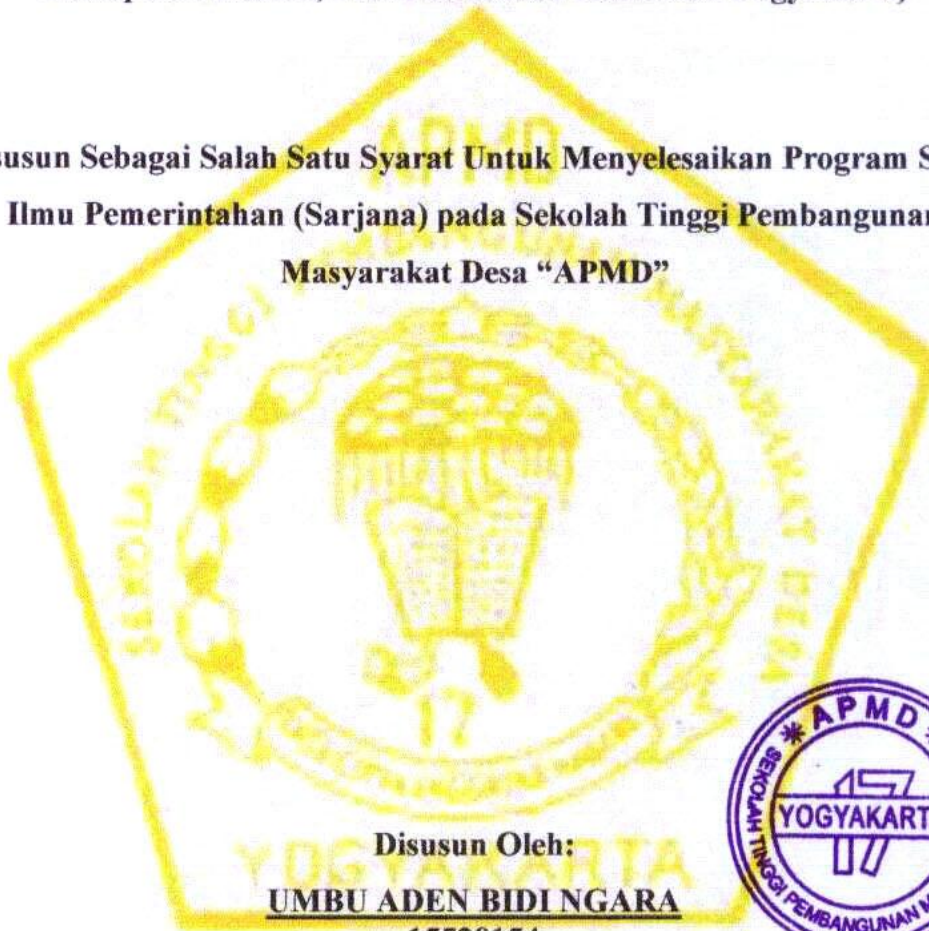
2021



SKRIPSI

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
UNTUK KESEJAHTRAAN PETANI MISKIN
KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN
SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Deskriptif Kualitatif Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Pemerintahan (Sarjana) pada Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD”**



Disusun Oleh:

UMBU ADEN BIDI NGARA

15520154



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APN'ID" Yogyakarta Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 September 2021

Jam : 10.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "AMPD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Drs. Jaka Triwidarayanta, M.Si.

Pembimbing

2. Dra. Herawati, MPA.

Penguji I

3. Dra. Tri Daya Rini

Penguji II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOAGYAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan Oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Januari 2022



UMBU ADEN BIDI NGARA

NIM : 1 5 5 2 0 1 5 4

MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan dan Kesuksesan”
(Penulis)

“Maiwa Kata Pulu Pamba Mata Bokul, Kata Hamayang Lai WULU TAU DJI
TAU Kana
Wuandaya na Wai Maring-Na Wai Malala Bata Pahalakuya Naray Rupung Danda
Okurung, Hamangkai Djiaka Naingkai Pakura Pama Nyara Nda Kata Itang Li
Loku Pala”
(Adat Sumba)

“Keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang kita dapatkan tetapi juga diukur
dari proses bagaimana kita melalui segala tantangan yang dihadapi”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tiada Kata Selain Mengucapkan Puji Dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat Dan Lindunga-Nya Saya Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Baik, Tiada Sesuatu Yang Lebih Berharga Yang Dapat Saya Berikan Tiada Kata Dan Cinta Yang Dapat Saya Ucapkan Melainkan Dengan Skripsi Ini Yang Dapat Saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Umbu Meheng Dan Mama Rambu Ana Lewa Mama Terimakasih Atas Doa, Cinta Kasih, Dukungan Dan Motivasinya, Selama Ini Tanpa Itu Semua Saya Pasti Tidak Seperti Ini.
2. Bapak Thomas K. Merang Dan Mama Marlin Rambu Kori. Terimakasih Atas Doa, Cinta Kasih, Dukungan Dan Motivasinya, Selama Ini Tanpa Itu Semua Saya Pasti Tidak Seperti Ini.
3. Saudara Saya, Rambu Ivon, Rambu Tiara, Umbu Ama Dan Umbu Tembang terimakasih Atas Doa, Cinta Kasih, Dukungan Dan Motivasinya, Selama Ini.
4. Seluruh Keluarga Saya, Baik Pihak Bapak maupun Dari Pihak Mama, Terimakasih Atas Doa, Dukungan, Nasehat, Serta Motivasinya Selama Ini.
5. Rambu Ester Sulastri Djangga Dewa, Atas Doa Dan Motivasinya Selama Ini.
6. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta Dimana Tempat Saya Mendapat Proses Perkuliahan, Pengalaman Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan.

7. Sahabat Karip, Umbu Chanda , Umbu Danil, Ken, Adfen, Arifin, Noker, Agus, Sani, Umbu Domu (Wunang), Umbu Rusdy, Sam Dangga, Vii Monang, Umbu Andra (Uand), Sagoro (Goman), Ardo, Tuku (Ciman).
Terimakasih Atas Kebersamaan Serta Motivasinya.
8. Teman Kkn Kerja Sama Bersama Bapeda Diy Terimakasih Atas Kebersamaan Dan Kerjasamanya Selama 30 Hari Kkn.
9. Resimen Mahasiswa Satuan Ghanesa “Apmd”. Komandan Krisna, Senior Edi, Provos Sani, Rekan Umbu Chanda, Rekan Umbu Danil, Rekan Agus, Rekan Ken, Rekan Noker, Rekan Gregor, Rekan Adven. Terimakasih Atas Kebersamaan, Pengalaman, Serta Perjuangan Bersama.
10. Organisasi Hipmasty Beserta Seluruh Anggota. Terimakasih Atas Didikan, Pengalaman Dan Kebersamaannya.
11. Organisasi Komal Beserta Seluruh Anggota, Terimakasih Atas Didikan, Pengalaman Dan Kebersamaannya.
12. Teman-Teman Kost 1000c, Kost Ubur-Ubur 69 Dan Markas Tb.8 No.16a.
Aya Erson, Aya Ipang, Aya Udar, Aya Anton, Aya Ardi, Nato, Yogi, Gunawan, Yano, Redem, Kaka Ricart, Kaka Cent, Kaka Cua, Kaka Ajo, Kaka Jo, Natan, Wili, Kaka Patrik, Kaka Ebit, Kaka Odan, Goris, Kaka Tomi, Ama Tino. Terimakasih Atas Kebersamaan Dan Canda Tawanya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam rangka menyanggah gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis sangat menyadari sekali bahwa sebagai manusia tidak terlepas dari salah, khilaf dan jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan skripsi ini agar bisa dibaca semua orang. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Sampai selesai skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan baik moril maupun materil yang sangat berharga dari berbagai pihak. Atas kebaikan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD Yogyakarta..
3. Bapak Drs. Jaka Triwidarayanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen khususnya dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kuliah dan membagi ilmunya selama berkuliah di STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Seluruh staf dan karyawan yang ada di STPMD “APMD” Yogyakarta.

6. Seluruh staf dan karyawan yang ada. Di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2022

Umbu Aden Bidi Ngara
NIM: 15520154

INTISARI

Desa Wonokerto memiliki aset desa berupa Tanah Kas Desa untuk dikelola agar menjadi pendapatan asli desa. Di Desa Wonokerto ini perlu mendapat perhatian dan keterlibatan pemerintah dalam hal membuat kebijakan pengelolaan tanah kas desa yang belum dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan cara menyewakanya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya “Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Petani Miskin Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan masalah, terutama kebijakan pemerintah desa. Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa subyek penelitian yaitu Pemerintah Desa, Ketua BPD, Masyarakat Informan berjumlah yaitu pemerintah desa masyarakat BPD, pelaku penyewa Tanah Kas Desa, informan sejumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data.

Hasil penelitian ini yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga masyarakat selalu berperan penting dalam kebijakan penegelolaan tanah kas desa. Kebijakan Pengelolaan tanah kas desa selalu berjalan lancar dan tertib karena dari awal sudah ada pendataan dalam penggunaan tanah kas desa untuk kepentingan masyarakat. Dari warga ada perwakilan untuk ikut sertakan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan tanah kas desa karena semua tanah kas desa yang ada di Kalurahan Wonokerto dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa warga ditunjuk oleh pemerintah desa untuk bekerja sama membuat kebijakan pengelolaan tanah kas desa, warga masyarakat yang mewakili disebut BPD. BPD akan selalu membantu dalam pengambilan kebijkan pengelolaan Tanah Kas Desa semua terikat oleh Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 dan perjanjian sewa yang telah disepakati dari awal. Adapun tanah kas desa yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan melalui disewakan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha masyarakat di bidang pertanian dan perikanan. Usaha ini akan sangat membantu warga dalam meningkatkan ekonomi.

Kata Kunci: Penegelolaan, Tanah Kas Desa, Kesejahteraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa merupakan entitas sosial politik, keberadaan desa lebih dahulu dibandingkan sebuah Negara, Namun sekali lagi meskipun menjadi asal muasal terlahirnya sebuah Negara, kondisi kehidupan masyarakat desa belum mampu menjawab harapan dalam mewujudkan manusia yang mandiri dan sejahtera, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Seolah-olah Desa Mengalami Kelahiran Kembali, menempatkan desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintah terendah di bawah kecamatan melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan hak asal-usul desa.

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa sekarang dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Desa diberi ruang dalam membingkai dan memberdayakan potensi-potensi masyarakat lokal dalam kesatuan dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa.

Konsep Desa Mandiri dalam Undang-Undang Desa sebenarnya dimaksudkan untuk menggantikan konsep otonomi desa, sebab otonomi desa

identik dengan otonomi tingkat III yang harus dihindari. Sekaligus juga menghindari semangat “kemandirian” yang melekat pada desa. Namun, mulai pendekatan dari perdebatan dalam Rancangan Undang-Undang Desa, Risalah hingga Naskah Undang-Undang Desa, sama sekali menjelaskan konsep desa mandiri. Dalam hal ini kemandirian desa bukan kesendirian, bukan juga kedirian (*autarchy*). Kesendirian berarti ego yang kuat. Desa akan mengklaim bahwa apa yang ada di dalam wilayahnya merupakan miliknya secara penuh, desa tidak mau diatur oleh negara atau tidak mau berhubungan dengan pihak lain, serta di anggap warga pendatang disebut sebagai “orang lain” yang beda dengan “orang asli”. Sedangkan kesendirian artinya desa mengurus maupun membangun dirinya sendiri dengan sumber-sumber daya yang dimilikinya tanpa dukungan negara. Dalam hal ini Negara tidak hadir mendukung desa atau Negara melakukan isolasi terhadap desa. Banyak desa selama ini tertinggal atau tidak maju antara lain karena negara membiarkan (isolasi) desa yang sedang berada dalam kesendirian (Sutoro Eko dkk, 2014: 82).

Aset Desa adalah sebuah modal utama yang bisa mendukung program kegiatan pembangunan dan kesejahteraan bagi anggota warga masyarakat. Sumber daya alam atau asset desa lainnya seperti tanah kas desa sangatlah penting bagi desa untuk dikelola dengan baik sebagai upaya pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. Dengan memanfaatkan aset desa secara maksimal dan tepat guna maka secara langsung akan memberikan pemasukan yang sangat berarti bagi pendapatan desa sebagai salah satu sumber pendapatan dan anggaran pembangunan. Pendapatan ini dapat

digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, serta pembangunan desa hingga dapat mendorong kesejahteraan dan kemandirian bagi anggota masyarakat. Tentu saja hal tersebut harus didukung dengan sumber daya aparatur pemerintah desa yang berkualitas dan mempunyai komitmen dalam mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Skripsi, Cosmas Giawa, 2013: 2).

Kemandirian desa tentu tidak sendiri, tetapi sangat penting melihat relasi antara desa dengan pemerintah (negara), termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap desa. Memang ada diklaim serius kehadiran (*intervensi*) Negara terhadap desa. Kalau negara tidak hadir salah, tetapi kalau hadir keliru. Konsep kesendirian desa menunjukkan bahwa negara tidak hadir, dalam hal ini negara melakukan isolasi terhadap desa sehingga wajar kalau ada ribuan desa berpredikat sebagai desa tertinggal, pada kutub yang lain, kehadiran negara yang berlebihan pada rana desa yang bisa disebut sebagai pemaksaan (*imposition*) justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kehadiran desa lebih baik dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (*rekognisi*) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitas terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas. (Sutoro Eko, 2014: 83)

Desa di Indonesia memiliki perbedaan karakter pada sosial masyarakat masalah satu dengan yang lain. Ini memperjelas bahwa pembangunan antara desa serta pola yang dibangun suatu desa dalam mendorong pembangunan sangat bervariasi. Salah satu hal yang sangat menarik dalam permasalahan di desa adalah tentang pengelolaan aset desa. Sesungguhnya merupakan aset yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk pemberdayaan bagi pemerintah desa. Aset desa dapat dikelola dengan baik, akan menjadi sumberdaya yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun langsung dari warga masyarakat atau pihak lain. Dalam perkembangannya desa semakin berkembang dalam segi pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemanfaatan aset desa disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang dilepaskan dengan dikuatkan atau didukung dengan bukti-bukti yang ada.
2. Surat pernyataan masing-masing yang disaksikan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat yang mengetahui di desa yang bersangkutan.
3. Tukar menukar antara pemerintah desa dengan orang perorangan, belum diterbitkan oleh keputusan kepala desa belum diterbitkan oleh Keputusan Bupati.
4. Belum/sudah tercatat dalam buku pemeriksaan atau buku tanah desa.

Aset desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, aset desa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Aset desa dapat dikelola oleh pemerintah desa sendiri, seperti menyewakan ke masyarakat atau pihak lain untuk dikelola sedangkan hasil dari pengelolaan aset desa berupa uang tunai yang nantinya akan dimasukkan kedalam rekening desa yang akan digunakan untuk kepentingan desa dan warga masyarakat, sehingga dapat menjadi pendukung peningkatan pendapatan asli desa semua ini bertujuan untuk kesejahteraan bagi anggota warga masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa bersifat strategis, aset desa yang dimaksud berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambaran perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum dan aset milik desa yang lainnya pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan aset milik desa, pemerintah desa dapat menugaskan Sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset milik desa. Aset desa yang ada dapat dikelola dan

dioptimalkan yang nantinya akan menghasilkan manfaat yang lebih dan juga akan mendatangkan sebuah keuntungan serta bertujuan untuk mengidentifikasi aset, sehingga akan diketahui aset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut.

Aset milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepala desa. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Aset desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan lagi kepada desa, kecuali yang sudah dipergunakan untuk fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum. Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Adapun beberapa dari tujuan pengelolaan aset desa sebagai berikut :

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.
3. Terwujudnya pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan efisien.
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa menjelaskan bahwa tanah kas desa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk kas desa, *bengkok/lungguh* dan *pengarem-arem*, pemanfaatan tanah desa sebagai mana dimaksud pada ayat satu (1) diatur dalam peraturan desa. Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) Harus Mendapatkan Izin Dari Gubernur. Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

dalam pemanfaatan tanah kas desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menegaskan aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Aset desa dapat di asuransikan sesuai keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa. Aset desa dilarang untuk digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa bagian Sewa Menyewa Pasal 8 (ayat 1) menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah kas Desa berupa sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan atas dasar :

- a. Menguntungkan Desa.
- b. Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun untuk sewa menyewa yang tidak mengubah peruntukannya sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- c. Jangka waktu sewa paling lama 20 tahun untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya sesuai dengan kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- d. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- e. Terhadap pelaksanaan sewa menyewa sebagai sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan evaluasi setiap 3 Tahun.
- f. Sewa menyewa tidak boleh dipergunakan untuk tempat tinggal pribadi/perorangan.
- g. Pihak penyewa tanah kas desa yang mengubah peruntukan tanah wajib menanggung biaya persertifikatan tanah kas desa yang disewa.
- h. Setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, pihak penyewa wajib menyerahkan seluruh bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah kas desa yang disewakan pemerintah desa disertai dengan berita acara serah terima.
- i. Khusus terhadap sewa menyewa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, aset yang didirikan di atas tanah kas desa tersebut tetap menjadi milik pemerintah daerah selama masih dipergunakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengatakan Pengelolaan Aset Desa, yang, berupa tanah kas desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan desa. Adapun hal yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut :

“Bagaimana Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Petani Miskin ?”

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan tanah kas desa di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa di Wonokerto, Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

1. Pengelolaan Tanah Kas Deas, di Kalurahan Wonokerto
2. Kebijakan Pemerintah Desa Pro Masyarakat Miskin di Kalurahan Wonokerto.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa wonokerto
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan wonokerto.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber pengetahuan tentang proses pengelolaan tanah kas desa.
2. Bagi Kalurahan Wonokerto

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi atau sumbangan pemeikiran yang berharga guna dipakai sebagi bahan evaluasi dan perbandingan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

4. Agar dapat menjadikan evaluasi perbaikan, terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan tanah kas desa

F. Review Literatur

1. Review Penelitian Terdahulu

Sebagian besar hasil penelitian tentang kebijakan pengelolaan tanah khas desa untuk kesejahteraan petani miskin dalam format tanah khas desa baru bergerak dalam pengembangan aset lokal tanah khas desa. Belum banyak studi tentang kebijakan pengelolaan tanah khas desa untuk kesejahteraan petani miskin. Dalam rangka mengkaji faktor penyebab kebijakan pengelolaan tanah khas desa untuk kesejahteraan petani miskin. Studi ini bergerak pada orientasi bahwa penting untuk mengkaji pengelolaan aset lokal tanah khas desa untuk mensejahterakan petani miskin. Argumen pokok yang ingin dibangun adalah adanya keyakinan bahwa inovasi menjadi variabel penting dalam merubah struktur ekonomi masyarakat desa menuju kemandirian.

Studi tentang pengelolaan tanah khas desa dan pemanfaatan tanah khas desa terbilang banyak sehingga dari penelitian ini membuat perbedaan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan fokus masalah.

Seperti yang terjadi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Tentang pengelolaan tanah khas desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Pacarejo belum optimal dilakukan, untuk pengelolaan tanah kas desa hanya pada tanah garapan pertanian. (1) produktivitas tanah kas desa, pengelolaan tanah kas desa terus berupaya untuk ditingkatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. (2) pengembangan penggunaan tanah kas desa di Pacarejo akan terus ditingkatkan untuk kebutuhan masyarakat secara bertahap dan teratur yang berada di wilayah tertentu dan akan membuat peraturan untuk pengelolaan tanah kas desa. (3) peningkatan pendapatan asli desa selalu ada tiap tahun dengan adanya swadaya, partisipasi, gotong royong dan hasil pariwisata yang ada di desa (Darius Anju Angu, 2020).

Gethuk di Desa Bleberan, Kecamatan, Playen, Gunung Kidul. Nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam pengelolaan tanah pariwisata. Penelitian menunjukkan nilai kearifan lokal yang digunakan dalam pengelolaan Wisata Sri Gethuk adalah nilai inovatif, nilai kegigihan, nilai kebersamaan, nilai musyawarah, nilai lokalitas dan nilai religius. Kedua, solusi jika terjadi benturan nilai dalam pengelolaan Wisata Sri Gethuk dilakukan melalui kompromi, musyawarah atau kebijaksanaan/kearifan (Agus Sudaryanto, 2018).

Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang. Kebijakan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) dan upaya perlindungan hukumnya bagi masyarakat dan pemerintah desa. Tujuan kebijakan ini merupakan Sumber

kekayaan negara adalah asset desa dimana tujuan pemberiannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan umum. Tujuan pengabdian ini hendak memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak mengenai pengaturan tanah kas desa berdasarkan hukum tanah nasional serta upaya perlindungan hukumnya bagi baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa itu sendiri (Intan Nevia Cahyana, 2019).

Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto. Analisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sistem pengelolaan tanah wakaf di Desa Sapanang pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional dan Pemanfaatan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir dari tanah makarn adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon jagung (Akrim A Djafar, 2020).

Berdasarkan hasil review, kajian ini berbeda dengan argumen kajian-kajian terdahulu. Penelitian ini hendak menakar penggunaan kewenangan pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan melalui pengelolaan aset lokal. Penelitian ini secara tegas hendak melihat bagaimana pemerintah desa menggunakan kewenangan untuk memberdayakan masyarakat menuju kemandirian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi baru atas ruang yang belum terisi, seperti hasil review penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

G. Kerangka Koseptual

1. Kebijakan Desa

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Publik artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah yang membuat program dengan kegiatan yang dijalankan.

Kebijakan publik merupakan upaya memahami dan mengartikan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah mengenai suatu masalah yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah mengenai suatu masalah, penyebabnya dan pengaruhnya. Menurut Carl Friedrich dalam Solihin A Wahab (2001:72), Kebijakan adalah: Tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencaoai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, suatu kebijakan merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dari berbagai kegiatan. Menurut RS Parker dalam Lilik Ekowati (2005:154) Kebijakan Publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkai prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau

krisis. Sedangkan menurut Anderson Dalam Hanif Nurcholis (2007:264) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga atau badan pemerintah dan pejabat-pejabatnya, selanjutnya dijelaskan bahwa implikasi definisi dari pengertian ini adalah :

- a. Bahwa kebijakan itu selalu memiliki tujuan atau tindakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan.
- b. Bahwa kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pemerintah/pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah.
- d. Bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang undangan yang bersifat memaksa.

Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengatur dan mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dan mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi di atas penulis berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang membawa nama publik atau masyarakat banyak berarti harus juga memperhatikan kebutuhan besar yang paling penting dari masyarakat, kebijakan pengelolaan, dan merupakan Tindakan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dilakukan oleh pemerintah dan jika tidak dilakukan itu merupakan keputusan yang baik di antara yang baik.

2. Tahap-Tahap atau Proses Perumusan Kebijakan

Menurut Riplay Dalam Budi Winarno (2007:33-34)

a. Agenda Setting

Tahap ini merupakan masalah dalam masyarakat yang mulai muncul melalui berbagai macam cara dan sasaran, kemudian menjadi perhatian pemerintah yang menganggap sebagai masalah penting. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah melakukan pengamatan sebagai masalah penting dan melihat besarnya tuntutan dukungan terhadap masalah yang terjadi.

b. Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini informasi mulai dikumpulkan, dianalisis dan disosialisasikan. Kemudian alternative jalan keluar yang akan ditempuh untuk memecahkan masalah tersebut mulai dikembangkan dengan mencari dukungan dari masyarakat melalui media masa dan organisasi sosial politik selanjutnya negosiasi dan kompromi bagaimana instansi yang terkait untuk mengambil keputusan yang diperlukan.

c. Penetapan Kebijakan

Penetapan Kebijakan Pengambilan keputusan dari alternatif kebijakan yang tersedia:

- 1) Penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan tertentu.

2) Penetapan kebijakan berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia. Tahap ini berkenaan dengan legitimasi dari alternatif yang dipilih, yakni berupa suatu rancangan tindakan-tindakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.

d. Implementasi Kebijakan

Merupakan proses pencapaian atau penggalian dan pengarahan sumber daya guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan kemudian selanjutnya mengadakan interpretasi terhadap kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program-program yang konkrit, demikaian juga perencanaan staf dan sumber daya, pengorganisasian serta penentuan siapa yang dijadikan sasaran layanan dan siapa yang akan terkena konsekuensi-konsekuensinya.

e. Evaluasi Kebijakan

Bagaimana implementasi itu dimulai, bagaimana perwujudannya, bagaimana akibatnya (*impact*). Maksudnya apakah kebijakan itu sudah mencapai sasaran seperti yang diharapkan, apakah sudah membawa keuntungan-keuntungan kepada si penerima program dan lain sebagainya.

f. Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan

mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

3. Pengelolaan

Dalam kamus besar bahas Indonesia tahun 2008 kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, artinya pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen. Menurut Follet dalam Hanafi (1997: 6) salah satu tokoh ilmuwan manajemen mendefinisikan manajemen sebagai “seni mencapai sesuatu melalui orang lain” (*the art of getting things done through the odhers*). Dengan definisi tersebut, manajemen tidak bekerja sendiri tetapi berkerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Hanafi (1997:6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “manajemen adalah proses, merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi”.

Pengelolaan berarti proses, pengarahan, pengurus, penyelenggara dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan

organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan dalam proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif yang ada. Manajemen juga sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu, karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain untuk menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi, karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik (Asmani, 2009: 70).

Berdasarkan pengertian manajemen di atas secara garis besar tahapan dalam manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan untuk menghasilkan suatu yang telah disepakati dengan pengawasan yang ketat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring setiap aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber yang dimilikinya secara efektif dalam mencapai tujuan.

Arti penting pengelolaan dalam konteks manajemen adalah memungkinkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasional secara bersama-sama. Selain itu pengelolaan memungkinkan kerja sama antar orang-orang dan individu dalam organisasi bisa mencapai tujuan tertentu. Begitu juga halnya dengan pengelolaan Aset Desa dimana dalam pengelolaannya harus mencakup tahapan yang terdapat dalam manajemen.(Skripsi Sopladi, 2017: 12)

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang mengadakan perhitungan. Untuk mendapatkan kesimpulan objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya yang menginterfestasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya (Moleong 2002: 127).

a. Objek Penelitian

Dalam sugiyono (2017:91), objek penelitian dapat dinyatakan bahwa dengan “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau

objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang atau (*actors*) yang ada pada tempatnya (*place*) tertentu.

Oleh karena objek peneliti ini adalah: Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Petani Miskin di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2010). Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat desa Wonokerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Jumlah informan : 7 orang

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1) Kepala Desa | : 1 orang |
| 2) Kepala Kasi Pemerintahan | : 1 orang |
| 3) Ketua BPD | : 1 orang |
| 4) Masyarakat | : 4 orang |

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini Teknik yang dilakukan adalah:

a. Observasi

Dalam Observasi Peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

penelitian, dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada makna dari setiap perilaku yang nampak. (Sugiyono, 2013: 64)

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak pewawancara (*interviewer*). (Burhan, 2013: 64) Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam kepada subjek penelitian dengan terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara yang terkait dengan kebijakan pengelolaan tanah kas desa untuk kesejahteraan petani miskin di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumen administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti (Nasution, 2003: 143).

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses

pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.(Sugiyono, 2017: 131-132)

Dalam tahapan analisis data ini penelitian menjadi sangat penting, karena dengan analisis data inilah data akan nampak manfaatnya terlebih lagi ketika memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus peneliti, maka peneliti akan melakukan tiga Langkah utama yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017:134-142), sebagai berikut :

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum

Terhadap situasi social/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Pada saat pengumpulan data ini peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi yang ada di lapangan mengenai kebijakan pengelolaan tanah kas desa untuk kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Wonokerto Kepawon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan tercapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan kekuasaan ke dalam wawasan yang tinggi. (Sugiyono 2017:137)

Pada saat reduksi data peneliti akan mengumpulkan data dan merangkumnya sesuai yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini oleh pemerintah desa dan masalah apa yang terjadi kendala dalam proses pengelolaan. Hal tersebut dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk selanjutnya dijadikan rangkuman.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart*. Menurut Miles Dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 137) "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past been narrative text*". Yang paling

sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sajian data yang dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti tentang kebijakan pengelolaan tanah kas desa untuk kesejahteraan petani miskin di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

d. *Verification atau conclusion drawing*

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.(Sugiyono, 2017:142). Temuan tersebut seperti deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu atau tidak nyata sehingga diteliti menjadi jelas. Dalam tahap ini peneliti bermaksud untuk menentukan data yang sifatnya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WONOKERTO

A. Sejarah Desa Wonokerto

Berdiri pada tahun 1947 yang merupakan penggabungan dari 4 kelurahan yaitu, Kelurahan Tunggularum, Kelurahan Ledok Lempong dan Kelurahan Dadapan. Sejarah Desa Wonokerto dibagi menjadi 5 kategori :

1. Tahun 1947-1954

Pada tahun tersebut dipimpin oleh Bapak Niti Pawiro, pusat pemerintah desa tersebut berada di Pedukuhan Dadapan menempati rumah Bapak Lurah Niti Pawiro. Pada masa tersebut pembangunan desa belum dapat terlaksanakan sebagaimana semestinya dikarenakan terbatasnya dana dan situasi masih dalam gejolak keamanan.

2. Tahun 1954-1961

Pada tahun tersebut Desa Wonokerto dipimpin oleh Wiro Sudarmo, kantor pemerintah desa berada di Pedukuhan Sangurejo. Pada masa tersebut telah dirintis pembangun jalan, jembatan, saluran air dan pembuatan lapangan Punthuk.

3. Tahun 1962-1996

Pada masa tersebut Desa Wonokerto dipimpin oleh Bapak Sastro Diharjo, awal kepemimpinannya Kantor Kepala Desa Wonokerto masih di rumah Bapak Lurah Desa yaitu di Nganggrung Lor, Wonokerto, Turi, 32

Sleman dan sedangkan mulai tahun 1968 kantor desa Wonokerto pindah di

Dusun Imorejo, Wonokerto, Turi. Hasil pembangunan :

- a. Pembangunan saluran air Bedhog Krasak, Sempu Baru, Sempu I dan Pandan Arum.
- b. Pembangunan jalan tembus Imorejo-Kiringan.
- c. Pembangunan jalan Sempu-Kaliurang.
- d. Pembangunan SD Banyuurip I dan II, SD Ngangruk I dan II, SD Muh Balerente.
- e. Pembangunan gedung kantor desa dan barak pengungsian.
- f. Pembangunan puskesmas pembantu.

4. Tahun 1996-2004

Kepala desa dijabat oleh bapak Suhartono. Hasil pembangunan :

- a. Rehab pasar desa.
- b. Pembangunan kios desa.
- c. Pembangunan pasar ikan.

5. Tahun 2005-2015

Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Kasidi. Hasil pembangunan :

- a. Pembangunan gedung kantor desa.
- b. Pembangunan pendopo kantor desa.

B. Keadaan Geografis

Desa Wonokerto berada di lereng/kaki gunung merapi yang terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara

geografis Desa Wonokerto terletak pada ketinggian 400-900m dari permukaan air laut. Dengan ketinggian tersebut, sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian.

Desa Wonokerto adalah daerah pertanian dengan sumber mata air 26 yang mengalir ke beberapa sungai yang mencukupi kebutuhan irigasi pertanian. Curah hujan rata-rata 3,908mm pertahun dengan suhu udara 24°C-28°C. Sumber air tanah yang mengalir di bawah permukaan berada di jalur mata air Turi-Sleman yang pemanfaatannya digunakan untuk sumber air bersih dan irigasi. Namun pada musim kemarau sebagian wilayah kekurangan air untuk pertanian, sedangkan untuk kebutuhan air minum sumber air tanah atau sumur di Desa Wonokerto masih tercukupi. Kondisi tanah di Desa Wonokerto merupakan daerah perbukitan atau pegunungan yang subur dengan struktur tanah yang merupakan tanah berpasir dan berbatu cadas.

1. Batas Administrasi

Secara administratif Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Desa Wonokerto memiliki batas-batas dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Girikerto, Kecamatan Turi
- b. Sebelah Timur : Desa Girikerto, Kecamatan Turi
- c. Sebelah Selatan : Desa Donokerto, Kecamatan Turi
- d. Sebelah Barat : Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

2. Pembagian Wilayah Pedukuhan

Desa Wonokerto terdiri dari 13 pedukuhan yang terdiri dari 63 RT dan 39 RW dengan rincian sebagai berikut; Desa Wonokerto terdiri dari 13 pedukuhan yang terdiri dari 63 RT dan 39 RW dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Pedukuhan, RW dan RT Desa Wonokerto

No	Nama Pedukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tanggularum	2	4
2	Gondoarum	2	4
3	Sempu	2	7
4	Banjarsari	3	5
5	Manggungsari	2	4
6	Imorejo	2	4
7	Jambusari	3	4
8	Dukuhsari	2	4
9	Kembang	2	4
10	Pojok	2	4
11	Sangurejo	2	5
12	Becici	3	6
13	Dadapan	2	5
Total		29	63

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Pedukuhan Becici merupakan salah satu pedukuhan di Desa Wonokerto yang memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan dengan pedukuhan lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada jumlah RT dan RW pada Pedukuhan Becici

yang jumlahnya lebih banyak, hal ini juga dikarenakan oleh kondisi wilayah Pedukuhan Becici yang relatif lebih baik dibandingkan pedukuhan lainnya.

3. Kondisi Wilayah dan Penggunaan

Luas wilayah desa Wonokerto 1.002, 9 Ha, yang berdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang/tegala, perkebunan, pemukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun rincian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan per Dukuh

No	Nama Pedukuhan	Jenis Penggunaan Lahan							Lain-lain	Jumlah
		Sawah/ Pertanian	Ladang/ Tegalan	Induftri	Perkebunan	Pemukim an	Perdagang an dan Jasa	Hutan		
1	Tunggularum	5	80	-	40	44	-	17	4	190
2	Gondoarum	10	38	-	50	10	-	-	-	108
3	Sempu	-	1, 2	-	34	51, 3	-	-	-	86, 5
4	Banjarsari	74	13, 5	-	1, 9	4, 9	-	-	-	94, 3
5	Manggungsari	4	20, 5	-	53, 5	8	-	-	-	86
6	Imorejo	25, 3	5, 4	1	1	31, 5	-	-	-	64, 2
7	Jambusari	37	10	-	-	2	-	-	1	50
8	Dukuhsari	36	-	-	10	9	-	-	-	55
9	Kembang	8	-	-	45	7, 5	1	-	-	61, 5
10	Pojok	5	2, 7	-	14, 6	21	-	-	-	43, 3
11	Sangurejo	28	4	-	-	8	-	-	-	40
12	Becici	3, 4	2, 8	0, 2	31, 8	25, 8	2, 9	-	-	66, 9
13	Dadapan	0, 7	9	-	32, 5	15	-	-	-	57, 2
	Total	236, 4	187, 1	1, 2	314, 3	238	3, 9	17	5	1002, 9
	Presentase %	23,57%	18,66%	0,12%	31,34%	23,73%	0,39%	1,70%	0,50%	100,0%

(Sumber :TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari luas wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam hal sumber daya pangan dan mata pencaharian penduduk desa Wonokerto. Dari tabel di atas dapat kita lihat perbandingan yang sangat jelas pada pedukuhan Sempuh yang sebagian besar lahan digunakan sebagai pemukiman penduduk, hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk yang berada pada pedukuhan Sempuh merupakan mayoritas pekerja di luar wilayah pedesaan, sehingga lahan yang ada sbagian besar tidak digunakan sebagai lahan untuk bertani dan lainnya. Sedangkan pada pedukuhan Banjarsari sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani, peternak dan lainnya. Sehingga lahan yang terdapat pada pedukuhan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian.

4. Luas Wilayah menurut Penggunaannya

Tabel 2.3

Luas Wilayah menurut Penggunaannya

No	Keterangan	Luas/Ha
1	Tanah	Ha
2	tanah sawah	550, 70 Ha
3	tanah kering	324, 21 Ha
4	tanah basah	0, 00 Ha
5	tanah perkebunan	0, 00 Ha
8	fasilitas umum	82, 99 Ha
7	tanah hutan	45, 00 Ha
8	Total luas	1.002, 90 Ha

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa luas lahan Desa Wonokerto memiliki luas sebesar 1.002,90 Ha. Lahan tanah sawah merupakan tanah dengan luas lahan terbanyak di Desa Wonokerto dengan luas lahan sebesar 550,70Ha. Kondisi Tata Guna Lahan:

a. Pertanian

Pada umumnya lahan di Desa Wonokerto digunakan untuk lahan pertanian, namun sebagian dari wilayahnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk lahan pertanian, dalam satu tahun masyarakat hanya bisa panen sebanyak dua kali dan produksinya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan saluran irigasi yang rusak akibat dampak sekunder bencana erupsi gunung merapi dan pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Namun demikian tanaman padi, jagung, kacang tanah, dan cabai masih menjadi tanaman pertanian di Desa Wonokerto, terutama tanaman cabai yang hasilnya cukup menjanjikan di saat harganya mahal. Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan desa Wonokerto, baik berperan langsung terhadap pembentuk Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan penciptaan ketahanan pangan maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya.

Tabel 2.4
Potensi Pertanian Desa Wonokerto

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai Produksi (Rp)	Biaya Pemupukan (Rp)	Biaya Bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Jagung	32	3	240000000	23000000	16000000	5000000	20000000
Kubis	0.3	1	750000	75000	25000	0	0
Mentimun	1	1.5	4500000	0	0	0	0
Buncis	0.2	0.25	100000	0	0	0	0
Umbi-umbian lain	2	6	30000000	5000000	2500000	0	0
Tumpang Sari	4	11	110000000	10000000	5000000	5000000	7500000
Padi Sawah	550	4	8800000000	1100000000	66000000	82500000	1545500000

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

b. Perkebunan

Perkebunan yang menjadi andalan dan merupakan pendapatan utama masyarakat di Desa Wonokerto adalah perkebunan kopi, kelapa, vanili dan tembakau yang terdapat di hampir semua wilayah Desa Wonokerto. Namun dalam kondisi saat ini masyarakat petani salak mengalami kendala dalam pemulihan kembali perkebunan pasca erupsi gunung merapi yang mengakibatkan abu vulkanik menutupi hampir seluruh tanaman salak, dan rusaknya saluran irigasi untuk perkebunan tersebut dan bagaimana pemasaran hasil panen agar bisa lebih luas jangkauan pemasarannya.

Tabel 2.5
Lahan Sub-Sektor Perkebunan

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai Produksi (Rp)	Biaya Pemupukan (Rp)	Biaya Bibit (Rp)	Biaya Obat (Rp)	Biaya Lainnya (Rp)
Kelapa	50	50	0	0	0	0	0
Kopi	1.38	0.21	0	0	0	0	0
Tembakau	0.2	0.03	0	0	0	0	0
Vanili	0.1	0.009	0	0	0	0	0

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas lahan yang terdapat tanaman kelapa merupakan lahan paling banyak dengan luas lahan mencapai 50 Ha dengan hasil produksi terbanyak pertahunnya. Sedangkan vanili merupakan tanaman yang luas lahan produksinya paling sedikit dengan total luas lahan 0.1 Ha.

c. Perikanan

Perikanan atau kolam ikan merupakan potensi yang cukup menjanjikan apabila dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Karena ketersediaan akan air yang cukup, maka warga masyarakat Desa Wonokerto memanfaatkan sebagian lahannya untuk lahan perikanan yang dikelola secara kelompok, salah satu contohnya adalah kelompok perikanan mina taruna yang terdapat di Pedukuhan Pojok. Pada tabel berikut dapat kita lihat jenis ikan yang dibudidaya dan jumlahnya.

Tabel 2.6

Jenis Industri Perikanan Masyarakat

Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yang Digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yang Digunakan (Rp)	Total Biaya antara yang Dihabiskan (Rp)	Jenis Usaha Perikanan
Lele	3	0	0	0	0	0
Nila	4	0	0	0	0	0

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jenis ikan yang yang dominan dikembangbiakkan adalah jenis ikan lele dan nila. Hal ini dikarenakan oleh perawatan ikan lele yang tidak memakan biaya lebih

dan perkembangan ikan lele juga lebih cepat, hasil produksi yang didapat masyarakat mencapai 3 ton per tahun dan nila sebanyak 4 ton per tahun.

d. Peternakan

Pada sektor peternakan Desa Wonokerto memiliki beberapa kelompok ternak yang telah menyatu dalam sebuah kandang kelompok yaitu di Pedukuhan Tunggularum, Gondoarum, Manggungsari, selain itu juga terdapat ternak kelinci di Dusun Dadapan. Peternakan yang paling banyak di Kalurahan Wonokerto masyarakatnya beternak sapi dan ayam yang merupakan ternak milik masyarakat dan hasil yang dirasakan cukup untuk menunjang ekonomi masyarakat. Tabel di bawah dapat kita lihat total produksi peternakan di Kalurahan Wonokerto.

Tabel 2.7
Jumlah Produksi Peternakan

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yang Digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yang Digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)
Susu	2160 kg/th	0	0	0	0
Telur	246000 kg/th	0	0	0	0
Daging	2125 kg/th	0	0	0	0

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jenis peternakan paling banyak dan hasilnya paling besar adalah telur dengan total hasil produksinya mencapai 246.000kg/tahunnya, susu ternak mencapai

2.160 kg/tahun dan pemasok daging paling sedikit totalnya dengan jumlah 2.125kg/tahunnya.

5. Kondisi Wilayah dan Penggunaan

Luas wilayah desa Wonokerto 1.002, 9 Ha, yang berdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang/tegala, perkebunan, pemukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan Per Dukuh

No	Nama Pedukuhan	Jenis Penggunaan Lahan							Lain-lain	Jumlah
		Sawah/Pertanian	Ladang/Tegalan	Induftri	Perkebunan	Pemukim an	Perdagangan dan Jasa	Hutan		
1	Tunggularum	5	80	-	40	44	-	17	4	190
2	Gondoarum	10	38	-	50	10	-	-	-	108
3	Sempu	-	1, 2	-	34	51, 3	-	-	-	86, 5
4	Banjarsari	74	13, 5	-	1, 9	4, 9	-	-	-	94, 3
5	Manggungsari	4	20, 5	-	53, 5	8	-	-	-	86
6	Imorejo	25, 3	5, 4	1	1	31, 5	-	-	-	64, 2
7	Jambusari	37	10	-	-	2	-	-	1	50
8	Dukuhsari	36	-	-	10	9	-	-	-	55
9	Kembang	8	-	-	45	7, 5	1	-	-	61, 5
10	Pojok	5	2, 7	-	14, 6	21	-	-	-	43, 3
11	Sangurejo	28	4	-	-	8	-	-	-	40
12	Becici	3, 4	2, 8	0, 2	31, 8	25, 8	2, 9	-	-	66, 9
13	Dadapan	0, 7	9	-	32, 5	15	-	-	-	57, 2
	Total	236, 4	187, 1	1, 2	314, 3	238	3, 9	17	5	1002, 9
	Presentase %	23,57%	18,66%	0,2%	31,34%	23,73%	0,39%	1,70%	0,50%	100,0%

(Sumber :TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari luas wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam hal sumber daya pangan dan mata pencaharian penduduk Desa

Wonokerto. Dari tabel di atas dapat kita lihat perbandingan yang sangat jelas pada Pedukuhan Sempuh yang sebagian besar lahan digunakan sebagai pemukiman penduduk, hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk yang berada pada pedukuhan Sempuh merupakan mayoritas pekerja di luar wilayah pedesaan, sehingga lahan yang ada sbagian besar tidak digunakan sebagai lahan untuk bertani dan lainnya. Sedangkan pada pedukuhan Banjarsari sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani, peternak dan lainnya. Sehingga lahan yang terdapat pada pedukuhan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian.

6. Batas Administrasi

Secara administratif Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Turi, Kabupjaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah desa Wonokerto memiliki batas-batas dengan wilayah sebgai beerikut ;

- a. Sebelah Utara: Desa Girikerto, Kecamatan Turi
- b. Sebelah Timur: Desa Girikerto, Kecamatan Turi
- c. Sebelah Selatan: Desa Donokerto, Kecamatan Turi
- d. Sebelah Barat: Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Desa Wonokerto terdiri dari 13 pedukuhan yang terdiri dari 63 RT dan 39 RW dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pembagian Wilayah Pedukuhan, RW dan RT Desa Wonokerto

No	Nama Pedukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tanggularum	2	4
2	Gondoarum	2	4
3	Sempu	2	7
4	Banjarsari	3	5
5	Manggungsari	2	4
6	Imorejo	2	4
7	Jambusari	3	4
8	Dukuhsari	2	4
9	Kembang	2	4
10	Pojok	2	4
11	Sangurejo	2	5
12	Becici	3	6
13	Dadapan	2	5
Total		29	63

(Sumber: *TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018*)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pedukuhan Becici merupakan salah satu pedukuhan di Desa Wonokerto yang memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan dengan pedukuhan lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada jumlah RT dan RW pada Pedukuhan Becici yang jumlahnya lebih banyak, hal ini juga dikarenakan oleh kondisi wilayah Pedukuhan Becici yang relatif lebih baik dibandingkan pedukuhan lainnya.

C. Demografi Desa

1. Jumlah Penduduk

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari potensi desa dan hasil survey oleh masyarakat. data-data kependudukan tersebut meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk 5 tahun terakhir, struktur umur, struktur pendidikan dan struktur mata pencaharian.

Jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto pada tahun 2018 adalah 10.086 jiwa dengan rincian 5.026 jiwa laki-laki dan 5.060 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di desa Wonokerto adalah 3.324 KK yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	2018	5026	5060
2	2017	4990	5041
3	Persentase perkembangan	0.72 %	0.38 %

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang dilihat dari jenis kelamin terjadi peningkatan dalam kurun waktu satu tahun yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah laki-laki yang mengalami kenaikan sebesar 36 orang dan jumlah perempuan 19 orang, dengan presentase perkembangan jumlah penduduk satu tahun ini mencapai 1,1%.

Tabel 2.11
Jumlah Kepala Keluarga

No	Tahun	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
1	2018	2994	330	3324
2	2017	2716	317	3033
Prosentase Perkembangan		10.24 %	4.1 %	

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah kepala keluarga yang terjadi dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 291 KK.

2. Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

No	Kelompok (tahun)	Jumlah (orang)
1	0-15	2.220
2	15-25	1.951
3	25-30	3.699
4	>50	2.216

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dilihat dari tingkat umur masyarakat pada tahun 2018, penduduk Desa Wonokerto yang berumur 25-49 tahun sejumlah 3.699 jiwa yang merupakan usia non produktif. Sedangkan untuk usia balita dan anak-anak 0-14 tahun sebesar 2.220 jiwa dan usia remaja/usia sekolah yaitu sebesar 1.951 jiwa, dengan kata lain bahwa usia produktif penduduk Wonokerto sebanyak 4.170 jiwa.

3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ada anggapan bahwa orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan jauh lebih baik dalam menghadapi suatu masalah dan dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Kemudian, pendidikan tidak jarang juga akan menentukan status sosial seseorang dimasyarakat, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi sering kali dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Unsur pendidikan juga dianggap akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan daerah, hematnya, apabila penduduk daerah tersebut memiliki pendidikan yang lebih baik maka diyakini daerah tersebut memiliki SDM yang mumpuni untuk pembangunan daerah tersebut.

Untuk melihat jumlah penduduk Desa Wonokerto. Berdasarkan pendidikan yang dijalani menurut data monografi Desa Wonokerto 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	683
2	PAUD	326
3	Ijasah TK	735
4	Ijasah SD	2.678
5	Ijasah SMP	1.989
6	Ijasah SMA	2.314
7	Ijasah Akademi/PT	375
8	Tidak Sekolah	986
Jumlah		10.086

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Jumlah penduduk dengan ijazah terakhir SD menempati porsi yang terbesar yaitu 2.678 jiwa, jumlah pendidikan yang paling terkecil adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 326 jiwa.

4. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	3.264
2	Buruh	647
4	Perkebunan	140
5	Pedagang	572
6	Pegawai Negeri (PNS)	245
7	Pegawai Swasta	476
8	Industri RT	159
9	Lain-lain	4.583
Jumlah		10.086

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Berdasarkan struktur mata pencaharian, jumlah terbesar adalah lain-lain sebanyak 4.583 jiwa, disusul petani sebanyak 3.264 jiwa, buruh sejumlah 647 jiwa, pedagang sebanyak 572 jiwa, pegawai swasta 476 jiwa dan 245 jiwa sebagai pegawai negeri. Sedangkan jumlah terkecil adalah sebagai industri rumah tangga yaitu sebanyak 159 jiwa.

D. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Desa Wonokerto terbagi menjadi beberapa sektor, sektor utama adalah pertanian termasuk didalamnya perkebunan salak, perikanan, peternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian/pekebunan salak pondok yang merupakan pendapatan para petani dan merupakan sektor yang mengangkat perekonomian masyarakat Desa Wonokerto. Akan tetapi sekarang kondisi pertanian belum tergarap secara optimal. Kondisi ini dipicu karena rusaknya sistem irigasi yang ada hampir diseluruh wilayah wonokerto akibat dampak sekunder erupsi gunung merapi tahun 2010. Efek yang ditimbulkan dari rusaknya sistem irigasi adalah masyarakat hanya dapat panen 2 kali dalam setahun sehingga panen salak pondok menurun karena pertumbuhannya tidak maksimal.

Hampir semua masyarakat Desa Wonokerto menanam dan berusaha yang berhubungan dengan salak pondok, baik itu pengepul atau pedagang, penyedia angkutan ataupun jasa lainnya seperti membersihkan lahan salak pondok. Namun demikian sektor yang lain seperti industri rumah tangga perdagangan dan jasa juga banyak digeluti oleh masyarakat Desa Wonokerto. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Wonokerto adalah bekerja seperti petani, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Wonokerto dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonokerto

No	Padukuhan	Tingkat Kesejahteraan Keluarga				Jumlah (KK)
		Sejahtera (KK)	Pra Sejahtera 1 (KK)	Pra Sejahtera 2 (KK)	Miskin (KK)	
1	Tunggularum	10	37	55	71	173
2	Gondolarum	17	34	88	34	173
3	Sempu	300	0	0	30	330
4	Banjarsari	117	28	28	42	215
5	Manggungsari	93	25	24	28	170
6	Imorejo	49	53	67	27	196
7	Jambusari	30	45	47	68	190
8	Dukuhsari	32	56	36	24	148
9	Kembang	50	41	42	37	170
10	Pojok	29	55	62	26	172
11	Sangurejo	101	77	56	47	281
12	Becici	52	82	78	36	248
13	Dadapan	58	44	77	51	230
	Total	938	577	660	521	2.696

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Pada tabel 2.9 dapat kita lihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Wonokerto paling banyak masyarakat sejahtera terdapat pada padukuhan Sempu dengan total KK yang sejahtera berjumlah 300 KK. Selanjutnya KK yang masyarakat sejahteranya paling sedikit terdapat pada padukuhan Tunggularum dengan total kk sebanyak 10 KK.

Fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di Desa Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadai terutama untuk tingkat layanan dengan

skala lokal. Pasar yang ada di Desa Wonokerto tidak hanya melayani wilayah Desa Wonokerto saja, akan tetapi melayani desa sekitarnya.

Tabel 2.15
Sebaran Fasilitas Ekonomi Desa Wonokerto

No	Padukuhan	Pasar Modern/ Swalayan/ Supermarket	Pasar Traditional	Ruko	Toko	Warung / Kios	Warung PKL
1	Tunggularum					9	1
2	Gondorarum			1	1	2	
3	Sempu	1	1		5	29	8
4	Banjarsari				3	8	2
5	Manggungsari				-	10	
6	Imorejo					8	
7	Jambusari					7	2
8	Dukuhsari					11	
9	Kembang					8	
10	Pojok					11	1
11	Sangurejo			8	14	4	4
12	Becici					13	
13	Dadapan					10	
Total		1	2	9	23	130	18

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Di sektor domestik peran peran kaum perempuan dalam mengelola rumah tangga, seperti industri makanan dan minuman, kerajinan salon dan potensi yang lain belum tergarap secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan terkndala masalah modal, pemasaran hasil produksi maupun kurangnya skill/keahlian dari warga masyarakat yang potensial. Selain itu, potensi perikanan/kolam ikan juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Di Wonokerto juga memiliki obyek wisata baik dikelola oleh desa maupun oleh masyarakat, yaitu Bumi Perkemahan di Padukuhan Kembang, Wisata Alam di Padukuhan Becici, Wisata Alam di Padukuhan Tunggularum. Sedangkan perternakan yang dikembangkan di Desa Wonokerto adalah ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek/itik, burung puyuh dan ayam. Harapan dikembangkannya potensi/usaha perternakan tersebut oleh masyarakat tidak lain juga untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, kegiatan perekonomian yang terdapat di Desa Wonokerto diantaranya kelompok simpan pinjam sebanyak 10 Lembaga dengan keanggotaan mencapai ratusan orang serta berbagai macam usaha kelontong yang sebagian besar di sekitaran pasar Balerante.

E. Kondisi Sosial

1. Kelembagaan

Kondisi sosial masyarakat Desa Wonokerto yang penuh kebersamaan, kegotong-royongan hingga saat ini masih terpelihara dengan baik, Nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung tinggi, sehingga setiap ada persoalan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah melalui mufakat. Di samping itu, hubungan kekerabatan dan keterikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling bantu-membantu baik dalam hal kesusahan maupun ketika masyarakat punya hajatan seperti keduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun

peringatan-peringatan lainnya. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan berjalan aktif. Adapun organisasi-organisasi yang ada di seluruh wilayah Desa Wonokerto di masing-masing padukuhan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

No	Pedukuhan	Jenis Kegiatan	Jml. Keg. Hr/Ming/Bln/ Thn	Jumlah Peserta (orang)	Penanggung Jawab	Ket.
1	Tunggularum	- Gotong-royong	Tiap bulan	173	Ketua RT	Keamanan kebersihan lingkungan
		- Arisan	Tiap minggu	173	Ketua RT	
		- Siskamling	Tiap minggu	50	Ketua RT	
		- PKK	Tiap bulan	100	Kader PKK	
2	Gondarum	- P3A	Tiap Bulan	40	Ketua	Keamanan kebersihan lingkungan
		- Karang taruna	Tiap Bulan	60	Ketua	
		- PKK	Tiap Bulan	50	Kader PKK	
		- Posyandu	Tiap 2 minggu	50	KaderPKK	
		- Pertemuan RT	Tiap Bulan	100	Ketua RT	
3	Sempu	- Siskamling	Tiap Minggu	30	Dukuh	
		- Gotong-royong	Tiap Bulan	100	KetuaRw	
		- Temu warga	Tiap Bulan	200	Ketua RT	
4	Banjarmasin	- Siskamling	Tiap hari	45	LPMD	Keamanan kebersihan lingkungan
		- Gotong royong	2x1 Bulan	150	LPMD	
		- Karang taruna	Tiap Bulan	50	Ketua	
5	Manggungsari	- Siskamling	Tiap hari	170	Dukuh	
		- Gotong royong	2x1 Bulan	150	Dukuh	
		- Pertemuan RT	1 Bulan	70	RT/RW	
6	Imorejo	- Gotongroyong			Dukuh	
		- Simpanpimjam				
		- Arisan				
		- Siskamling				
		- Pengajian				
		- Merti Bumi				

7	Jambusari	- Siskamling - Gotong royong	Tiap hari 2x 1 Bulan	159	Dukuh	
8	Dukuhsari	- Arisan - Kerja bakti - Pengajian - Kenduri	Tiap Bulan	55 156 200 50	Dukuh Takmir	Keamanan kebersihan lingkungan
9	Kembang	- Siskamling - Gotong royong	Tiap hari 2x1 Bulan	170	Dukuh	
10	Pojok	- Siskamling - Gotong royong - Temu warga	Tiap hari 2x1 Bulan Selapanan		Ketua RT Dukuh	Keamanan kebersihan
11	Sangurejo	- Siskamling - Gotong royong - Temu warga	Tiap hari 2x1 Bulan Selapanan		Ketua RT Dukuh	
12	Becici	- Siskamling - Gotong royong	Tiap hari 2x 1 Bulan	225	Ketua RT Dukuh	
13	Dadapan	- LPMD - PKK - Lansia - Karang Taruna - Kel.Ternak - Pengajian		299	Ketua RT Dukuh	Keamanan kebersihan lingkungan

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa keorganisasian masyarakat yang berada di Desa Wonokerto berjalan dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan contohnya gotong-royong dan siskamling yang diadakan pada setiap pedukuhan, dengan total hampir seluruh masyarakat mengambil bagian pada kegiatan tersebut.

2. Budaya

Budaya yang berkembang di Desa Wonokerto adalah budaya masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya masih tinggi. Keberadaan kesenian di Desa Wonokerto sangat beragam yang bernuansa adat Jawa seperti kesenian jathilan, Kubro Siswo, Dayakan, Badwi, Wayang orang sampai yang bernuansa Islami seperti Hadroh. Semua berkembang dengan baik dan selaras dikarenakan masyarakat Desa Wonokerto selain agamais juga mempunyai budaya kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota masyarakat sekitar. Warga Desa Wonokerto juga masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka sebagai orang Jawa seperti masih menjalankan/melaksanakan berbagai upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau life circle, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Upacara Mitoni yaitu selamat pada saat usia kehamilan mencapai genap 7 bulan.
- b. Upacara Puputan yaitu upacara selamat pada saat tali pusar bayi sudah lepas/mengering
- c. Jagongan yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau begadang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu).

- d. Selapanan yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 hari sebagai ucapan rasa syukur.
- e. Upacara Kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
- f. Upacar Khitanan yaitu tanda bahwa anak laki-laki sudah memasuki aqil balik menjadi laki-laki dewasa.
- g. Upacara Pernikahan dengan berbagai urutan pernik tradisi jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.
- h. Upacara Adat Merti Bumi aebagai icon Desa Wonokerto yang diwujudkan atas rasa syukur kepada Tuhan.
- i. Upacara Adat Pager Bumi yang secara garis besar hampir sama dengan upacara adat merti bumi.

Kelompok RT (Rukun Tetangga) kegiatannya cukup menonjol dan fanatik akan pembangunan baik dari pengerjaan dan segi pembiayaan meski demikian kesatuan warga dusun masih tetap terpelihara. Event-event penting seperti peringatan hari besar nasional hari besar keagamaan dan kegiatan adat dilaksanakan rutin setiap tahunnya sehingga dalam kegiatan tersebut sebagai pembelajaran generasi penerusnya serta memberikan kesempatan kepda grup-grup seni budaya yang ada di dalamnya untuk mengekspresikan kemampuannya. Semua kegiatan ini adalah sebuah bentuk realisasi masnyarakat Desa Wonokerto yang masih mengung budaya kekeluargaan.

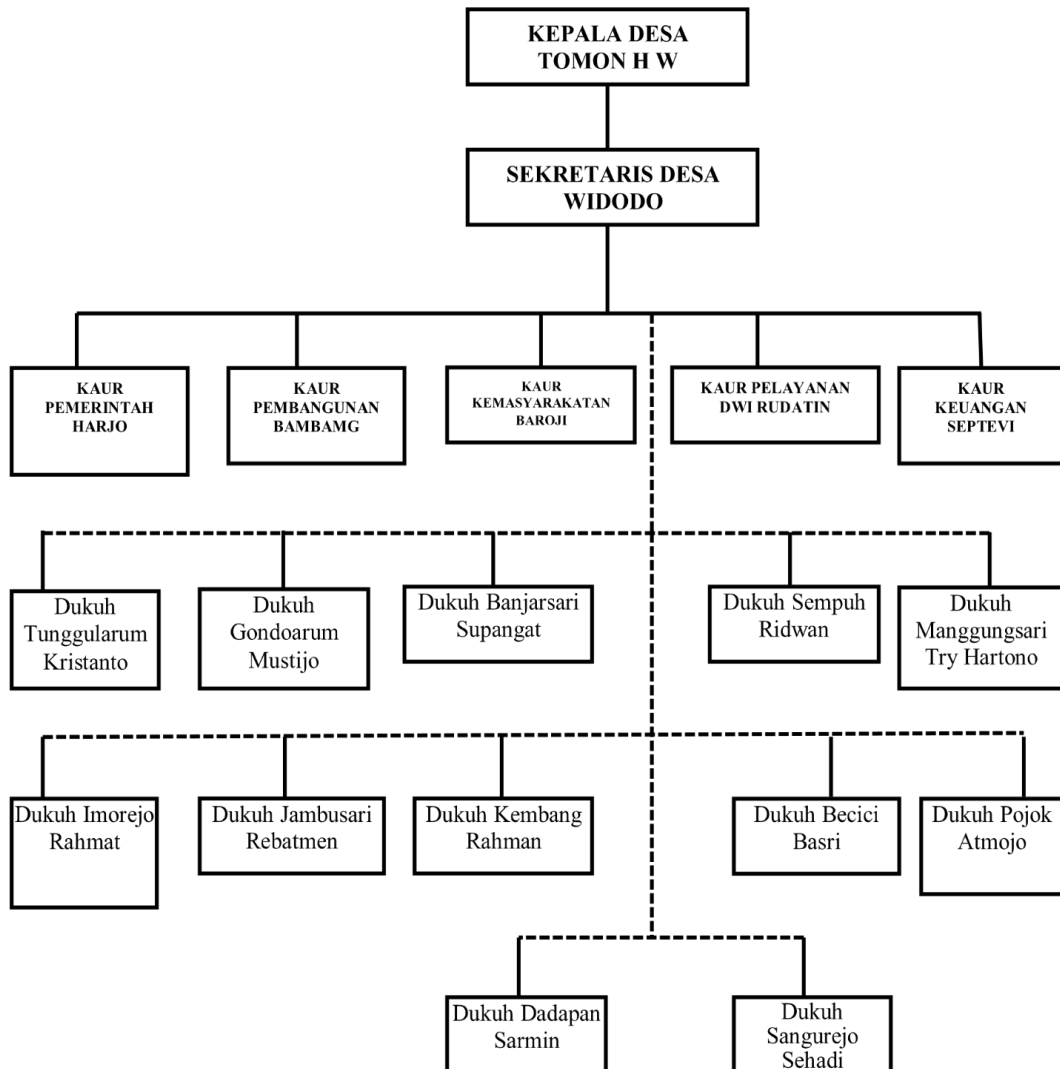
Tabel 2.17
Jenis Kegiatan Budaya Desa Wonokerto

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan/Mingg, Bulan, Tahun	Jumlah Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Merti Bumi	1x1 Tahun	500	Kristanto	
2	Merti Bumi, Nyandran, Jathilan, Syawalan, Natalan	Tiap Tahun	581, 173, 50	Ketua Panitia	
3	Badui/Kobrosiswo, Hadro/rebana	1x1 minggu	204	Ridwan	latihan
4	Tari Topeng Ireng	1x1 minggu	75	Supangat	latihan
	Kobrosiswo, Sholawatan	1x1 minggu	65 & 25		latihan
5	Saparan.Jatilan	1x1 Th	400		
6	Jathilan	1x1 Bln	50	Sumanto	Latihan
	Sparan dan Nyandaran	1x1 Th	660	Dukuh	
7	Nyandran, Merti Dusun Kubrosiswo/Rebana	1x1 Th	890	Dukuh	
8	Kuda Lumping Nyandran, Swalayan	Tiap Bulan, Tiap Tahun, Tiap Tahun	45, 500, 150	Dukuh Dukuh	Latihan rutin Latihan rutin
9	Merti Dusun	Tiap Tahun	650	Dukuh	
10	Gejog Lesung, Nyandran, Syawalan				
11	Sholawatan Laras Madyo, Nyandran Syawalayan	1x1 Bln 1 Thn	20		

(Sumber: TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018)

Di Desa Wonokerto terdapat berbagai kawasan heritage/pusaka budaya baik berupa pusaka alam maupun pusaka budaya (rumah tradisional yang berupa joglo dan limasan). Bangunan maupun benda tersebut sebagian besar dalam cukup baik, karna tetap terawat oleh masyarakat sekitar.

F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonokerto



(Sumber : *TIM RPJMDES PERUBAHAN Desa Wonokerto, 2018*)

1. Aparatur Desa

- a. Kepala Desa: Tomon H.W
- b. Sekretaris Desa: Widodo
- c. Kaur Pemerintahan: Didik irwanto
- d. Kaur Pembangunan: Bambang
- e. Kaur Kemasyarakatan: Baroji

- f. Kaur Pelayanan Umum: Dwi Rudatin
- g. Kaur Keuangan: Septevi
- h. Kaur Perencanaan: Eko Wahyudi
- i. Staf Desa: Didik Irwanto, Feri Fitanto, Yunita, Saimin, Armunanto
- j. Kepala Dukuh :
 - Dukuh Tunggularum : Kristanto
 - Dukuh Gondoarum : Mustijo
 - Dukuh Sempuh : Ridwan
 - Dukuh Banjarsari : Supangat
 - Dukuh Imorejo : Rahmat
 - Dukuh Manggungsari : Try Hartono
 - Dukuh Jambusari : Rebatmen
 - Dukuh Dukuhsari : Ganjar
 - Dukuh Kembang : Rahman
 - Dukuh Pojok : Atmojo
 - Dukuh Becici : Basri
 - Dukuh Dadapan : Sarmin
 - Dukuh Sangurejo : Sahadi

2. Visi Misi Desa

a. Visi

Wonokerto Sebagai Desa Siaga Bencana Yang Aman, Nyaman, Adil,
Makmur, Sejahtera,
Berbudaya Dan Religius.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana mengingat wilayah Desa Wonokerto merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB) I, II dan III khususnya bencana akibat erupsi gunung berapi.
 - 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara arif dan bijaksana.
 - 3) Mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel, transparan, berintegritas, berdedikasi, bermartabat, bersih dari korupsi dan nepotisme (KKN) yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri/golongan.
 - 4) Menjadikan Desa Wonokerto sebagai desa wisata yang didukung oleh sumber daya alam, seni dan budaya, industri kreatif dan industri kuliner.
 - 5) Meningkatkan kualitas pendidikan, budi pekerti, agama, informal dan non formal untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, cerdas, budi pekerti luhur, dan daya saing.
 - 6) Menjadi Desa Wonokerto sebagai desa yang sejahtera, adil dan makmur bertumbuh pada tiga pilar yaitu Agri Industri, Agro Bisnis dan Agro Wisata.
- a. Kepala Desa

Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan Kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa).
- 2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD
- 4) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD.
- 5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa.
- 6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga.
- 7) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- 8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sekretaris Desa

Tugas pokok dari Sekretaris Desa antara lain membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi dari Sekretaris Desa antara lain :

- 1) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar
- 2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan
- 3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa.
- 4) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa.
- 5) Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan.
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

c. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan. Fungsi kepala urusan umum :

- 1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar.

- 2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa Melakukan tugas administrasi umum.
- 3) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor.
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa.
- 5) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan.
- 6) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa.

d. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok dari kaur pemerintahan antara lain membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa.

Fungsi dari kepala urusan pemerintahan antara lain :

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan sertakeputusan kepala desa.
- 3) Melaksanakan administrasi pertanahan
- 4) Mencatatat monografi desa.
- 5) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk
- 6) Memperlancar penyelenggaraan dalam pemeritahan di desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat.

- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.
- 8) Yang dimaksud dengan Administrasi pemerintahan desa contohnya adalah :
- 9) Membuat Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
- 10) Membuat surat keterangan tidak mampu yang diperuntukkan bagi mereka yang keadaan ekonominya kurang atau warga tidak mampu dengan tujuan agar diberikan kemudahan atau penangguhan apabila diperlukan. Misalnya ketika ada anggota keluarga yang masuk rumah sakit, kartu ini diperlukan bagi warga tak mampu supaya mendapatkan potongan biaya atau penangguhan pembayaran. Perlu diketahui juga bahwa pembuatan SKTM atau surat keterangan tidak mampu ini gratis dan tidak dipungut biaya.
- 11) Surat pengantar pernikahan
- 12) Surat keterangan domisili
- 13) Surat keterangan lalu lintas
- 14) Surat keterangan pindah
- 15) Surat keterangan pengantar kepolisian
- 16) Surat keterangan lahir atau mati
- 17) Surat keterangan jual beli hewan
- 18) Surat keterangan pengiriman wesel
- 19) Pungutan saat terjadi transaksi jual atau beli tanah
- 20) Surat keterangan tebang kayu atau bambu

21) Surat keterangan izin keramaian

22) Surat keterangan ke bank, dan lain sebagainya

e. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan atau kepala urusan pembangunan memiliki tugas pokok antara lain adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, mengelola pelayanan masyarakat. (baca: fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan).

Fungsi kaur pembangunan antara lain adalah :

- 1) Sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pembangunan;
- 2) Mempersiapkan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat;
- 3) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

f. Kepala Dusun atau Dukuh

Kepala dusun atau dukuh memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam wilayah kerjanya
- 2) Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat

- 3) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya
- 4) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

Fungsi kepala dusun antara lain adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya Pemerintahan desa, serta membina masyarakat yang ada di dusun.
- 2) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun.
- 3) Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 4) Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.

g. BPD (Badan Perwakilan Desa)

Tugas dari Badan Perwakilan Desa antara lain adalah :

- 1) Membahas tentang rancangan atau rencana peraturan desa yang dibuat bersama dengan kepala desa

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anonim, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Asmani, Jamal M. 2009. *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Diva Press (Anggota IKAPI): Yogyakarta.
- Budi Winanrno M.A, (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medprest (anggota IKAPI)
- Ekowati, Mas Roro Lilik.(2005). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Edisi Revisi. Bandung: PT Rosda Karya.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, Jilid Pertama, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hanafi, Mahmud M. 1997. *Manajemen*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta.
- Husaini Usman, M.pd dan R. Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2006. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practice*. Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, dan Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California: Brooks/Cole.
- Slamet, Margono. 2003. "Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Menuju Pertanian Modern." Dalam *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Diedit oleh: Adjat Sudrajat dan Ida Yustina. Bogor : IPB Press.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial dan pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sutoro, Eko, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembagunan*. PT Gunung Agung: Jakarta.

Sumber Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des

Sumber Skripsi

Giawa, Cosmas. 2013. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. STPMD "APMD". Yogyakarta.

Sumber Jurnal

Cahyana, Intan Nevia. "Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Tkd) Dan Upaya Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang Yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.2 (2019).

Darius, Anju Angu. "Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa." (2020).

Djafar, Akrim A. "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)."

Sudaryanto, Agus. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk Di Bleberan, Playen, Gunung Kidul." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30.1 (2018): 78-93